

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN ,PENGELOLAAN KUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2017**, dapat diselesaikan dengan baik.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep ini dilakukan, sebagai tindak lanjut dari perencanaan strategik dalam rangka mendukung budaya transparansi, merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program melalui pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap kegiatan, program, kebijaksanaan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menjadi kesadaran mendalam, bahwa dalam pembuatan LKjIP ini masih banyak ditemui kekurangan. Untuk itu segala input konstruktif dan inovatif, sangat diharapkan guna kesempurnaan pelaksanaan Program Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimasa yang akan datang.

Akhirnya penghargaan dan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan LKjIP ini, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan perencanaan kebijakan selanjutnya.

Sumenep, Pebruari2018

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. Ec. H. DIDIK UNTUNG SAMSIDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580227 198403 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Disamping itu, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep melaporkan capaian kinerja (performance result) sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategik tahun 2017, Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep melaksanakan 76 (Tujuh puluh enam) kegiatan dari 7(Tujuh) program untuk mendukung pencapaian 2 misi (Misi 3 dan 4) . Keberhasilan pencapaian tersebut diukur melalui indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LKjIP tahun 2017 ini menunjukkan keberhasilan masing-masing tujuan dan sasaran, namun demikian masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Kekurangan dan upaya perbaikan yang akan dilakukan telah diuraikan secara lengkap pada bagian evaluasi akuntabilitas kinerja.

Pada akhirnya, Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Sumenep, Pebruari2018

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. Ec. H. DIDIK UNTUNG SAMSIDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580227 198403 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	2
C. Struktur Organisasi BPPKAD.....	5
BAB II PERENCANAANKINERJA	7
Rencana Strategi	7
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	7
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.....	9
3. Penetapan Kinerja.....	10
4. Program Untuk Pencapaian Sasaran	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja 2017	13
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	14
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	14
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	20
BAB IV PENUTUP.....	27
Daftar Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan tugas pembantuan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan. Penyusunan laporan kinerja ini sesuai dengan amanah yang dikandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2017 sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan melalui pengukuran atas pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Bupati Sumenep dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan mencantumkan target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu Laporan Kinerja tahun 2017 juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 diharapkan dapat memberi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Menginformasikan atas pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Sumenep.

1.2 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas hasil evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja serta kajian atas pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Sumenep masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah;
3. Rendahnya kapasitas fiskal;
4. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah;
6. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep masih ditemukan penjelasan antara lain tentang pengelolaan aset daerah , aset belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang jelas dan lengkap. Hal tersebut mengindikasikan belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah kurang akurat;
7. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
8. Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau sebaliknya berkurangnya ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan, 2) bertambahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah dan 3) bertambahnya kapasitas fiskal daerah, strategi yang diambil yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan yaitu sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:
 - a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; dan
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
2. Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - b. Pengkajian atas potensi dari jenis retribusi baru dan potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3 (tiga);
 - c. Optimisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.
4. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat agar menjadi bagian

dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
 - b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah SKPD/Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sumenep melalui kegiatan forum komunikasi pengurus barang milik daerah;
 - c. Dipergunakan SIMBADA dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi;
 - d. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
 - e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barangOPD.
5. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran. Strategis yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan disiplin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam DPA/DPPA OPD;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPDserta di anggaran belanja pada seluruh OPD dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
 - c. Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan OPD tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;

Organisasi BPPKAD

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah telah dibentuk organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang merupakan gabungan dari Bagian Keuangan yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, Bagian Perlengkapan yang membidangi pengelolaan aset/kekayaan daerah dan Badan Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah. Dalam perkembangan kebutuhan, karakteristik, kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Struktur Organisasi BPPKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan otonomi daerah pada bidang administrasi keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, terdapat tiga fungsi yang melekat pada kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah), dan selaku Pengguna anggaran/pengguna barang daerah. Ke-tiga fungsi tersebut diatas menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari Bupati Sumenep selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan, keuangan dan barang daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumenep berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pengkoordinasian Program Kerja pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;

2. Pelaksanaan Program dan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan;
3. Pelaksanaan Program dan kebijakan teknis di Bidang Penatausahaan Keuangan;
4. Pelaksanaan Program dan Kebijakan teknis di Bidang Aset;
5. Pelaksanaan Program dan Kebijakan teknis di Bidang Pembukuan dan Verifikasi;
6. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
7. Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah;
8. Penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
9. Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang milik Daerah;
10. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008, (terlampir)

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep sebagai Lembaga Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan Tugas dan Fungsinya melakukan Program kegiatan teknis dibidang Pendapatan, Penatausahaan Keuangan dan Bidang Pembukuan dan Verifikasi dan sebagai fungsi Bendahara Umum Daerah.

2.1 Visi , Misi Tujuan dan Sasaran

Untuk itu Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021 adalah “ **Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintah Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional**”. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut

1. Potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing yang tinggi.
2. Meningkatkan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan kultur dan tata kelolapemerintahan yang professional dan akuntabel.
5. Meningkatkan tatakelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan.
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta rasionalisme yang didukung kearifan local dalam kehidupan masyarakat.

Terhadap Visi diatas mengandung pengertian bahwa Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan mengarahkan dan

memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih yang diarahkan untuk menuju kota yang maju.

Tugas dan fungsi BPPKAD yang terkait dengan Visi Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Tugas dan Fungsi BPPKAD ini berhubungan dengan Misi ke 4 (empat) Misi Pembangunan sumenep tahun 2016-2021 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel**. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja dijiwai dengan semangat dan komitmen melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Sumenep secara akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan good and clean goverment. Berlandaskan atas semangat dan komitmen juga berupaya mewujudkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan
2. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi aset dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas telah terkait dengan Visi Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pndapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Tugas dan Fungsi BPPKAD ini berubungan dengan Misi ke 4 (empat) Misi Pembangunan Sumenep Tahun 2016-20121 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel** yang telah disesuaikan dengan sasaran Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 2021. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut terdapat 31 sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset bertanggungjawab atas terwujudnya sasaran ke-pertama dan ke-tiga dari tujuan dan misi empat yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel"** dengan arah kebijakan inventarisasi, klarifikasi dan penataan aset daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Adapun sasaran Indikator tujuan ke-tiga Kabupaten

Sumenep adalah nilai opini BPK untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Keuangan Daerah BPPKAD. Sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yaitu dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (key performance indikator) memiliki peran dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realitis. Berikut ini akan disajikan rumusan sasaran dan IKU Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai berikut: (**lihat Tabel 2.1**)

Tabel 2.1 Rumusan sasaran dan IKUBPPKAD

Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Opini BPK	Opini pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Total belanja modal dibagi total belanja daerah x
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase PAD Terhadap APBD.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{100\% \times \text{Total Pendapatan Daerah}}$

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Capaian atas Indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis pada kondisi awal (tahun 2017) yaitu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan target kondisi akhir dari rencana strategis (tahun 2021) adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.2)

Tabel 2.2 Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target Akhir (Tahun 2021)
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Opini BPK	WTP : 1 WDP : 2	2	1
Meningkatkan PAD	1. Persentase PAD Terhadap APBD.	%	96,9 %	100 %

2.3 Penetapan Kinerja

Dokumen penetapan kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan organisasi dalam periode waktu satu tahun. Dokumen penetapan kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPPKAD sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Bupati Sumenep sebagai pihak ke-dua selaku pemberi amanah yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.

Gambar 2.3 Dokumen Perjanjian Kerja BPPKAD Tahun 2017(terlampir)

Dalam dokumen Perjanjian kinerja tersebut memuat pernyataan Perjanjian kinerja aparatur, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target kinerja yang ingin dicapai juga memuat anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Penyusunan Perjanjian Kinerja BPPKAD berdasarkan pada Rencana Strategis BPPKAD, Rencana Kinerja BPPKAD tahun 2017, IKU BPPKAD Tahun 2017. Perjanjian Kinerja tahun 2017 merupakan Rencana Strategis BPPKAD sehingga capaian kinerja tahun 2017 tersebut mencerminkan capaian awal Rencana Startegis BPPKAD tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja BPPKAD tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) BPPKAD Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir(Tahun 2021)
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Opini BPK	WTP : 1 WDP : 2	1
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	2. Persentase PAD Terhadap APBD.	persen	100 %

2.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPKAD tahun 2017 membutuhkan anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Sumenep tahun 2017 sebesar Rp.2.357.563.008.157,00. Anggaran tersebut dibutuhkan oleh BPPKAD untuk melaksanakan program pokok kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan pokokbeserta pagu anggaran belanja langsung per sasaran strategis dan per indikator kinerja adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.4)

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Belanja Langsung Per sasaran dan Per Indikator Kinerja Tahun 2017			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Anggaran setelah perubahan
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kekayaan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7.815.212.651,00
		Program Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	3.994.140.120,00
		Jumlah	11.829.352.771,00
	Pagu Anggaran Belanja Langsung Sasaran I		11.829.352.771,00
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7.815.212.651,00
		Program Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	3.994.140.120,00
	Jumlah	11.809.352.771,00	
Pagu Anggaran Belanja Langsung Sasaran II		11.809.352.771,00	
Pagu Anggaran Belanja Langsung Sasaran I dan II		23.638.705.542,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang mengemban amanah melaksanakan tata kelola pada bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan atas anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis BPPKAD tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja BPPKAD tahun 2017 dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja. Sebagai landasan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku penerima amanah dengan Bupati Sumenep sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPKAD dengan realisasi. Pengukuran atas capaian kinerja tersebut mempergunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3 Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90,1$	Sangat Baik	
2.	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3.	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4.	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

A. Capaian Kinerja Organisasi

Selama periode tahun 2017 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah melaksanakan ketugasan pada urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tercermin dengan pencapaian atas indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPKAD tahun 2017 dan Capaian atas IKU BPPKAD adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemda	Opini BPK	WTP	WTP	100 %
2	Meningkatkan PAD	Persentase Pendapatan Asli Daerah	100 %	96,93 %	96,9 %

Data Sementara belum Ada Opini Hasil Audit BPK

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu .

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				2016	2017
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemda	Opini BPK	WTP	WDP	WTP
2	Meningkatkan PAD	PersentasePendapatan Asli Daerah	100 %	122,13 %	96,93 %

Data Sementara belum Ada Opini Hasil Audit BPK

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RPJMD / RENSTRA .

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemda	Opini BPK	WTP	100%	100 %
2	Meningkatkan PAD	PersentasePendapatan Asli Daerah	100 %	96,93 %	96,9 %

Data Sementara belum Ada Opini Hasil Audit BPK

Sasaran 1



Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemda

Keberhasilan capaian dari sasaran I Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dari dua indikator kinerja dengan kategori capaian Tinggi yaitu sebagai berikut:

A. Opini BPK

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep 2017 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun berdasar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). LKPD Kabupaten Sumenep tahun 2017 disusun oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dimulai pada bulan Januari 2017 dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD terdiri LRA, neraca dan CALK. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2017 disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah disampaikan kepada Bupati Sumenep selaku pemegang kekuasaan atas keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Paling lambat tiga bulan atau pada tanggal 30 Maret 2017 LKPD Kabupaten Sumenep telah disampaikan oleh Bupati Sumenep kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, LKPD terlebih dahulu di review oleh Inpsektorat Kabupaten Sumenep.

Dikarenakan Belum Selesainya Audit BPK pada Tahun 2017. BPK Belum ada opini tahun 2017. Pemberian opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep masih dalam Proses Audit.

Tabel 3.7

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK atas LKPD
Pemerintah Kabupaten Sumenep**

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target akhir (RPJMD Tahun 2017)	Realisasi capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021
		Target	Realisasi	% Realisas		
Opini BPK RI atas LKPD Kab. Sumenep TA. 2017 (WTP : 1 dan WDP : 2)	2	1	1	100%	1	100%

Data Sementara belum Ada Opini Hasil Audit BPK

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah dari tahap perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan opini WDP menjadi WTP dengan terlaksananya program-program sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan;
3. Program Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah;

Upaya yang telah dilakukan oleh BPPKAD selama tahun 2017 dalam mempersiapkan LKPD Kabupaten Sumenep tahun 2017/tahun 2018 agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah/peraturan bupati tentang APBD/Penjabaran APBD yang ditetapkan menjadi peraturan daerah/peraturan bupati tentang APBD/Penjabaran APBD sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Peraturan daerah/peraturan bupati tentang APBD/perubahan APBD dipergunakan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat serta sebagai landasan operasional SKPD dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan, yaitu sebagai berikut:
- b. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Sumenep Tahun 2017;

- c. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2017, telah disusun rancangan peraturan daerah/peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 yang ditetapkan menjadi sebagai berikut:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan pada tanggal 28 Nopember 2017;
 - Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan pada tanggal 28 Nopember 2017;
- d. Terlaksananya tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang terintegrasinya seluruh fungsi dari fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah sampai dengan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan mempergunakan sistem informasi keuangan daerah yaitu aplikasi Simda Keuangan Daerah yang telah berbasis akrual.

Selain itu dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaksanaan akrual basis dalam Simda Keuangan daerah khususnya entry pendapatan dan belanja telah dilaksanakan pendampingan pada tahun 2017;
- e. Telah disusun modul analisa standar belanja (ASB) sebagai instrumen bagi seluruh OPD dalam memberi penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga OPD dalam mengusulkan kegiatan merupakan usulan yang paling ekonomis, efisien, dan efektif.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk mewujudkan faktor pendukung dari aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, kelengkapan regulasi dan kepatuhan sebagai upaya mendapatkan opini WTP atas LKPD Kabupaten Sumenep sehingga Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat meraih opini WDP.



B. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Capaian indikator kinerja dari sasaran 2 (kedua) menunjukkan satu indikator kinerja dengan katagori capaian SANGAT BAIK Capaian atas indikator kinerja dari sasaran meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Capaian IKU nomor satu berupa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 merupakan capaian kinerja tahun 2017 yang memperoleh penilaian tahun 2017 sedangkan realisasi atas IKU pada tahun 2017 baru dapat diperoleh pada tahun 2018.

Dari hasil pengukuran capaian atas ke-dua indikator kinerja utama tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kedua indikator kinerja utama Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menunjukkan katagori Sangat Baik dengan persentase 96,9% dan hanya satu indicator kinerja utama dengan katagori realisasi capaian Sedang dengan nilai persentase sebesar 75 %

Tahun 2017 pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp. 2.160.990.882.075,06 atau meningkat dari realisasi tahun 2016 Rp 2.059.564.134.914,75, Pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah disajikan pada tabel sebagai berikut: (**Tabel 3.21**)

Tabel tersebut diatas diperoleh informasi bahwa dari ke tiga sumber pendapatan asli daerah di realisasi Tahun 2016 terdapat satu sumber pendapatan asli daerah yang dicapai Melebihi Target yang ada yaitu Persentase lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada realisasi tahun 2017 Yakni 140,50 %.

(Tabel 3.2.3) sebagaimana tersebut diatas menunjukkan tahun Target dan Realisasi Tahun 2016 sumber-sumber pendapatan daerah baik target maupun realisasi memiliki pertumbuhan yang positif. Dari ke-tiga sumber pendapatan daerah tersebut, lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang Positif Yakni 100,49 %Pertumbuhan pendapatan selanjutnya dari pendapatan asli daerah dengan persentase pertumbuhan pendapatan sebesar 122,13%. Sedang pertumbuhan

pendapatan tertinggi dari dana perimbangan dengan persentase pertumbuhan pendapatan sebesar 97,37%.

(Tabel 3.3.5) Pada sektor pendapatan daerah, BPPKAD selain sebagai salah satu Badan penghasil juga melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mengelola pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

(Tabel 3.3.6) tersebut diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola oleh BPPKAD selaku PPKD terealisasi atau terdapat selisih sebesar Rp. 2.160.990.882.075,06 atau terealisasi sebesar 104,92% dari pertumbuhan tahun 2016 . Hal tersebut disebabkan karena jumlah pendapatan daerah tersebut sangat dipengaruhi dengan pagu anggaran pendapatan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai koordinator pendapatan daerah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah
2. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah;
3. Belum adanya database potensi pendapatan daerah;
4. Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi;

Solusi

1. Perlu dilaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli daerah;
2. Perlu dilakukan pendataan dan pemeliharaan basis data PBB P2 secara rutin setiap tahun;
3. Perlu dilaksanakan sosialisasi lebih intensif dalam rangka meningkatkan keadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah atas kewajibannya;
4. Perlu dilaksanakan pendataan dan penyimpanan database dengan menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi;
5. Perlu koordinasi yang sinergis antar OPD penghasil

Tabel 3.2.1

Pertumbuhan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 -2017

Uraian	REALISASI		Bertambah (berkurang)	
	2016	2017	Rupiah	%
PENDAPATAN DAERAH	2.059.564.134.914,75	2.160.990.882.075,06	101.426.747.160,31	104,92
PENDAPATAN ASLI DAERAH	208.982.186.960,75	190.751.415.565,06	(18.230.771.395,69)	91,28
Hasil Pajak Daerah	17.736.010.382,00	24.095.356.184,27	6.359.345.802,27	135,86
Hasil Retribusi Daerah	25.080.452.414,68	12.734.295.205,00	(12.346.157.209,68)	50,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.151.337.010,24	20.122.055.248,12	4.970.718.237,88	132,81
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	151.014.387.153,83	133.799.708.927,67	(17.214.678.226,16)	88,60
DANA PERIMBANGAN	1.519.918.959.175,00	1.505.652.308.070,00	(14.266.651.105,00)	99,06
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	128.057.691.068,00	95.953.589.690,00	(32.104.101.378,00)	74,93
Dana Alokasi Umum	1.110.487.853.000,00	1.099.838.350.000,00	(10.649.503.000,00)	99,04
Dana Alokasi Khusus	281.373.415.107,00	309.860.368.380,00	28.486.953.273,00	110,12
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	330.662.988.779,00	464.587.158.440,00	133.924.169.661,00	140,50
Pendapatan Hibah	1.277.697.500,00	71.085.723.000,00	69.808.025.500,00	5.563,58
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah	83.029.447.279,00	111.373.876.585,00	28.344.429.306,00	134,14
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	213.894.164.000,00	271.522.438.855,00	57.628.274.855,00	126,94
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah	32.461.680.000,00	10.605.120.000,00	(21.856.560.000,00)	32,67
BELANJA DAERAH	2.048.692.697.927,37	2.059.742.179.836,36	11.049.481.908,99	100,54
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.345.634.676.874,60	1.313.063.698.853,80	(32.570.978.020,80)	97,58
Belanja Pegawai	921.858.081.258,60	836.317.468.920,80	(85.540.612.337,80)	90,72
Belanja Hibah	40.157.930.800,00	39.690.414.600,00	(467.516.200,00)	98,84
Belanja Bantuan Sosial	15.736.630.000,00	9.624.440.000,00	(6.112.190.000,00)	61,16
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	366.505.495.016,00	426.053.446.148,00	59.547.951.132,00	116,25
Belanja Tidak Terduga	1.376.539.800,00	1.377.929.185,00	1.389.385,00	100,10
BELANJA LANGSUNG	703.058.021.052,77	746.678.480.982,56	43.620.459.929,79	106,20
Belanja Pegawai	60.866.254.783,00	72.252.892.334,00	11.386.637.551,00	118,71
Belanja Barang Dan Jasa	370.177.191.111,16	382.541.613.077,70	12.364.421.966,54	103,34
Belanja Modal	272.014.575.158,61	291.883.975.570,86	19.869.400.412,25	107,30
SURPLUS / (DEFISIT)	10.871.436.987,38	101.248.702.238,70	90.377.265.251,32	931,33
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	107.195.000,00	38.696.206.164,39	38.589.011.164,39	36.098,89
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		38.526.591.151,39	38.526.591.151,39	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	107.195.000,00	169.615.013,00	62.420.013,00	158,23
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.500.000.000,00	25.195.000.000,00	12.695.000.000,00	201,56
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	12.695.000.000,00	12.695.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	-12.392.805.000,00	13.501.206.164,39	25.894.011.164,39	(108,94)

Tabel 3.2.2

**Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep
Tahun 2017**

Uraian	Tahun 2017		Bertambah (berkurang)	
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rupiah	%
PENDAPATAN DAERAH	2.128.779.863.857,00	2.160.990.882.075,06	32.211.018.218,06	101,51
PENDAPATAN ASLI DAERAH	196.786.697.840,00	190.751.415.565,06	(6.035.282.274,94)	96,93
Hasil Pajak Daerah	20.805.328.884,00	24.095.356.184,27	3.290.027.300,27	115,81
Hasil Retribusi Daerah	13.099.105.040,00	12.734.295.205,00	(364.809.835,00)	97,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.563.087.500,00	20.122.055.248,12	2.558.967.748,12	114,57
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	145.319.176.416,00	133.799.708.927,67	(11.519.467.488,33)	92,07
DANA PERIMBANGAN	1.510.220.414.952,00	1.505.652.308.070,00	(4.568.106.882,00)	99,70
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	103.066.007.024,00	95.953.589.690,00	(7.112.417.334,00)	93,10
Dana Alokasi Umum	1.099.838.350.000,00	1.099.838.350.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	307.316.057.928,00	309.860.368.380,00	2.544.310.452,00	100,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	421.772.751.065,00	464.587.158.440,00	42.814.407.375,00	110,15
Pendapatan Hibah	60.331.600.000,00	71.085.723.000,00	10.754.123.000,00	117,83
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	78.486.746.065,00	111.373.876.585,00	32.887.130.520,00	141,90
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	271.773.005.000,00	271.522.438.855,00	(250.566.145,00)	99,91
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.181.400.000,00	10.605.120.000,00	(576.280.000,00)	94,85
BELANJA DAERAH	2.357.563.008.157,00	2.059.742.179.836,36	(297.820.828.320,64)	87,37
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.429.314.169.254,00	1.313.063.698.853,80	(116.250.470.400,20)	91,87
Belanja Pegawai	944.184.228.952,00	836.317.468.920,80	(107.866.760.031,20)	88,58
Belanja Hibah	40.482.524.500,00	39.690.414.600,00	(792.109.900,00)	98,04
Belanja Bantuan Sosial	12.152.630.000,00	9.624.440.000,00	(2.528.190.000,00)	79,20
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.319.564.504,00	0,00	(2.319.564.504,00)	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	428.122.749.298,00	426.053.446.148,00	(2.069.303.150,00)	99,52
Belanja Tidak Terduga	2.052.472.000,00	1.377.929.185,00	(674.542.815,00)	67,14
BELANJA LANGSUNG	928.248.838.903,00	746.678.480.982,56	(181.570.357.920,44)	80,44
Belanja Pegawai	80.483.033.625,00	72.252.892.334,00	(8.230.141.291,00)	89,77
Belanja Barang Dan Jasa	465.695.138.781,00	382.541.613.077,70	(83.153.525.703,30)	82,14
Belanja Modal	382.070.666.497,00	291.883.975.570,86	(90.186.690.926,14)	76,40
SURPLUS / (DEFISIT)	(228.783.144.300,00)	101.248.702.238,70	330.031.846.538,70	(44,26)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	320.764.601.300,00	38.696.206.164,39	(282.068.395.135,61)	12,06
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	289.764.601.300,00	0,00	(289.764.601.300,00)	0,00
Pencairan Dana Cadangan	31.000.000.000,00	38.526.591.151,39	7.526.591.151,39	124,28
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	169.615.013,00	169.615.013,00	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	91.981.457.000,00	25.195.000.000,00	(66.786.457.000,00)	27,39
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	100,00
Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	79.481.457.000,00	12.695.000.000,00	(66.786.457.000,00)	15,97
PEMBIAYAAN NETTO	228.783.144.300,00	13.501.206.164,39	(215.281.938.135,61)	5,90
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	114.749.908.403,09	114.749.908.403,09	100,00

Tabel 3.2.3

**Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten
Sumenep Tahun 2016**

Uraian	Tahun 2016		Bertambah (berkurang)	
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rupiah	%
PENDAPATAN DAERAH	2.061.160.965.358,00	2.059.564.134.914,75	-1.596.830.443,25	99,92
PENDAPATAN ASLI DAERAH	171.118.867.687,00	208.982.186.960,75	37.863.319.273,75	122,13
Hasil Pajak Daerah	18.091.517.862,00	17.736.010.382,00	-355.507.480,00	98,03
Hasil Retribusi Daerah	17.332.292.249,00	25.080.452.414,68	7.748.160.165,68	144,7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.337.250.000,00	15.151.337.010,24	-185.912.989,76	98,79
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	120.357.807.576,00	151.014.387.153,83	30.656.579.577,83	125,47
DANA PERIMBANGAN	1.561.006.833.000,00	1.519.918.959.175,00	-41.087.873.825,00	97,37
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	118.127.873.000,00	128.057.691.068,00	9.929.818.068,00	108,41
Dana Alokasi Umum	1.110.487.853.000,00	1.110.487.853.000,00	0	100
Dana Alokasi Khusus	332.391.107.000,00	281.373.415.107,00	-51.017.691.893,00	84,65
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	329.035.264.671,00	330.662.988.779,00	1.627.724.108,00	100,49
Pendapatan Hibah	1.544.106.754,00	1.277.697.500,00	-266.409.254,00	82,75
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	82.081.327.917,00	83.029.447.279,00	948.119.362,00	101,16
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	212.948.150.000,00	213.894.164.000,00	946.014.000,00	100,44
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lain	32.461.680.000,00	32.461.680.000,00	0	100
BELANJA DAERAH	2.261.255.056.588,00	2.048.692.697.927,37	-212.562.358.660,63	90,6
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.390.510.040.580,00	1.345.634.676.874,60	-44.875.363.705,40	96,77
Belanja Pegawai	957.444.729.678,00	921.858.081.258,60	-35.586.648.419,40	96,28
Belanja Hibah	42.228.702.600,00	40.157.930.800,00	-2.070.771.800,00	95,1
Belanja Bantuan Sosial	18.371.880.000,00	15.736.630.000,00	-2.635.250.000,00	85,66
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Peme	2.319.564.504,00	0	-2.319.564.504,00	0
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota D	368.145.163.798,00	366.505.495.016,00	-1.639.668.782,00	99,55
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.376.539.800,00	-623.460.200,00	68,83
BELANJA LANGSUNG	870.745.016.008,00	703.058.021.052,77	-167.686.994.955,23	80,74
Belanja Pegawai	63.323.773.605,00	60.866.254.783,00	-2.457.518.822,00	96,12
Belanja Barang Dan Jasa	446.326.885.875,00	370.177.191.111,16	-76.149.694.763,84	82,94
Belanja Modal	361.094.356.528,00	272.014.575.158,61	-89.079.781.369,39	75,33
SURPLUS / (DEFISIT)	-200.094.091.230,00	10.871.436.987,38	210.965.528.217,38	-5,43
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	291.285.969.313,00	107.195.000,00	-291.178.774.313,00	0,04
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	291.285.969.313,00	0	-291.285.969.313,00	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	107.195.000,00	107.195.000,00	100
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	91.191.878.083,00	12.500.000.000,00	-78.691.878.083,00	13,71
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0	100
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	78.691.878.083,00	0	-78.691.878.083,00	0
PEMBIAYAAN NETTO	200.094.091.230,00	-12.392.805.000,00	-212.486.896.230,00	-6,19
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	-1.521.368.012,62	-1.521.368.012,62	100

Data sementara belum audit BPK

Tabel 3.3.4

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola
BPPKAD Tahun 2017**

Uraian	Tahun 2017		Bertambah (berkurang)	
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rupiah	%
PENDAPATAN DAERAH	2.002.158.919.964,00	2.055.596.175.573,83	53.437.255.609,83	102,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.165.753.947,00	85.356.709.063,83	15.190.955.116,83	121,65
Hasil Pajak Daerah	20.805.328.884,00	24.095.356.184,27	3.290.027.300,27	115,81
Pajak Hotel	196.285.307,00	379.348.503,27	183.063.196,27	193,26
Hotel Melati Satu	176.477.807,00	347.548.503,27	171.000.696,27	196,97
Losmen / Rumah Penginapan / Pasanggrahan /	19.837.500,00	31.800.000,00	11.962.500,00	160,3
Pajak Restoran	1.612.418.526,00	1.896.309.864,00	283.891.338,00	117,61
Restoran	33.401.463,00	73.104.271,00	39.702.808,00	218,87
Katering	1.565.000.000,00	1.813.325.593,00	248.325.593,00	115,87
Warung	14.017.063,00	9.880.000,00	-4.137.063,00	70,49
kaki Lima	0	0	0	0
Pajak Hiburan	133.238.770,00	95.925.000,00	-37.313.770,00	71,99
Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana	90.038.511,00	83.150.000,00	-6.888.511,00	92,35
Permainan Ketangkasan	5.000.000,00	4.065.000,00	-935.000,00	81,3
Pertandingan Olahraga	38.200.259,00	8.710.000,00	-29.490.259,00	22,8
Pajak Reklame	338.304.670,00	396.098.315,00	57.793.645,00	117,08
Reklame Papan / Billboard / Videotron/Megatron	253.278.499,00	310.674.365,00	57.395.866,00	122,66
Reklame Kain / Spanduk / Umbul-Umbul	80.948.325,00	85.423.950,00	4.475.625,00	105,53
Reklame Selebaran	4.077.846,00	0	-4.077.846,00	0
Pajak Penerangan Jalan	12.231.022.194,00	14.631.511.904,00	2.400.489.710,00	119,63
Pajak Penerangan Jalan PLN	12.231.022.194,00	14.631.511.904,00	2.400.489.710,00	119,63
Pajak Air Tanah	102.575.000,00	162.425.954,00	59.850.954,00	158,35
Pajak Air Tanah	102.575.000,00	162.425.954,00	59.850.954,00	158,35
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	328.609.417,00	224.643.250,00	-103.966.167,00	68,36
Pasir Kerikil	86.250.000,00	75.414.568,00	-10.835.432,00	87,2
Pasir Urug	14.683.256,00	4.511.250,00	-10.172.006,00	30,72
Batu Gunung	189.559.017,00	139.770.000,00	-49.789.017,00	73,73
Pasir Saur	13.617.047,00	4.658.500,00	-8.958.547,00	34,21
Batu Bata Putih	8.277.793,00	1.341.000,00	-6.936.793,00	16,2
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangu	1.639.000.000,00	4.204.704.675,00	2.565.704.675,00	256,54
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangu	1.639.000.000,00	4.204.704.675,00	2.565.704.675,00	256,54
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perk	4.223.875.000,00	2.104.388.719,00	-2.119.486.281,00	49,82
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perk	4.223.875.000,00	2.104.388.719,00	-2.119.486.281,00	49,82
Hasil Retribusi Daerah	338.160.121,00	364.626.100,00	26.465.979,00	107,83
Retribusi Jasa Usaha	338.160.121,00	364.626.100,00	26.465.979,00	107,83
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	338.160.121,00	364.626.100,00	26.465.979,00	107,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipis	17.563.087.500,00	20.122.055.248,12	2.558.967.748,12	114,57
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perus	17.563.087.500,00	20.122.055.248,12	2.558.967.748,12	114,57
PDAM	86.250.000,00	100.000.000,00	13.750.000,00	115,94
Perusahaan Daerah Sumekar	66.125.000,00	66.125.000,00	0	0
PT. Sumekar Line	172.500.000,00	164.384.983,00	-8.115.017,00	95,3
PT. Wira Usaha	760.437.500,00	7.244.533.504,28	6.484.096.004,28	952,68
Bank Jatim	10.037.775.000,00	6.294.128.728,84	-3.743.646.271,16	62,7
BPRS	6.440.000.000,00	6.319.008.032,00	-120.991.968,00	98,12
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31.459.177.442,00	40.774.671.531,44	9.315.494.089,44	129,61
Hasil Penjualan Aset daerah Yang Tidak Dipisah	169.186.000,00	169.186.000,00	0	100
Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tid	0	0	0	0
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	19.755.000,00	19.755.000,00	0	100
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	149.431.000,00	149.431.000,00	0	100
Penerimaan Jasa Giro	1.978.851.420,00	762.050.085,94	-1.216.801.334,06	38,51
Jasa Giro kas Daerah	1.978.851.420,00	762.050.085,94	-1.216.801.334,06	38,51
Penerimaan Bunga Deposito	23.460.000.000,00	28.609.960.189,23	5.149.960.189,23	121,95
Rekening Deposito pada Bank BPD Jatim	6.149.625.000,00	10.431.104.381,32	4.281.479.381,32	169,62
Rekening Deposito pada Bank BNI '46	3.861.125.000,00	2.615.527.396,00	-1.245.597.604,00	67,74
Rekening Deposito pada Bank BRI	5.593.600.000,00	7.181.277.556,00	1.587.677.556,00	128,38
Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negar	5.554.500.000,00	6.568.309.588,95	1.014.309.588,95	118,26
Rekening Deposito pada Bank BPD Jatim Cabar	79.350.000,00	640.924.657,39	561.574.657,39	807,72
Rekening Deposito pada Bank Mandiri	2.221.800.000,00	1.172.316.609,57	-1.049.483.390,43	52,76
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	43.958.593,00	55.000.000,00	11.041.407,00	125,12
Kerugian Uang	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100
Kerugian Barang	33.958.593,00	45.000.000,00	11.041.407,00	132,51
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaks	198.375.000,00	357.516.804,91	159.141.804,91	180,22
Bidang Pekerjaan Umum	198.375.000,00	357.516.804,91	159.141.804,91	180,22
Pendapatan dari Pengembalian	5.608.806.429,00	10.820.958.451,36	5.212.152.022,36	192,93
Setoran Pengembalian Tahun Lalu	345.000.000,00	75.414.568,00	-269.585.431,80	21,86
Setoran Pengembalian Lain-Lain	4.932.252.730,00	10.413.990.184,16	5.481.737.454,16	211,14
Setoran Pengembalian Tahun Lalu dari JKN	331.553.699,00	331.553.699,00	0	100
DANA PERIMBANGAN	1.510.220.414.952,00	1.505.652.308.070,00	-4.568.106.882,00	99,7
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	103.066.007.024,00	95.953.589.690,00	-7.112.417.334,00	93,1
Bagi Hasil Pajak	89.208.455.290,00	78.914.723.183,00	-10.293.732.107,00	88,46
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	39.252.153.986,00	31.288.056.316,00	-7.964.097.670,00	79,71
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25	19.813.646.656,00	15.228.473.219,00	-4.585.173.437,00	76,86
Bagi Hasil Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	30.142.654.648,00	32.398.193.648,00	2.255.539.000,00	107,48
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	13.857.551.734,00	17.038.866.507,00	3.181.314.773,00	122,96
Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan	334.347.917,00	182.913.667,00	-151.434.250,00	54,71
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplo	2.003.076,00	58.865.576,00	56.862.500,00	2.938,76
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.269.155.400,00	447.937.200,00	-821.218.200,00	35,29
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	11.225.733.613,00	13.675.201.526,00	2.449.467.913,00	121,82
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.000.407.468,00	2.655.890.678,00	1.655.483.210,00	265,48
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	25.904.260,00	18.057.860,00	-7.846.400,00	69,71
Dana Alokasi Umum	1.099.838.350.000,00	1.099.838.350.000,00	0	100
Dana Alokasi Umum	1.099.838.350.000,00	1.099.838.350.000,00	0	100
Dana Alokasi Umum	1.099.838.350.000,00	1.099.838.350.000,00	0	100
Dana Alokasi Khusus	307.316.057.928,00	309.860.368.380,00	2.544.310.452,00	100,83
Dana Alokasi Khusus	140.856.512.277,00	127.893.446.765,00	-12.963.065.512,00	90,8
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	24.253.000.000,00	19.403.739.000,00	-4.849.261.000,00	80
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	13.588.000.000,00	12.815.503.488,00	-772.496.512,00	94,31
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	39.832.852.591,00	36.175.794.591,00	-3.657.098.000,00	90,82
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigas	33.713.106.675,00	32.297.159.675,00	-1.415.947.000,00	95,8
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air M	12.634.370.738,00	9.423.283.000,00	-3.211.587.738,00	74,58
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Peril	1.420.000.000,00	4.134.585.738,00	2.714.585.738,00	291,17
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	9.729.000.000,00	9.387.810.000,00	-341.190.000,00	96,49
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencar	966.000.000,00	0	-966.000.000,00	0
Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.632.855.000,00	1.632.855.000,00	0	100
Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	889.000.000,00	725.407.000,00	-163.593.000,00	81,6
Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Tran	697.827.273,00	697.827.273,00	0	100
Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	-300.000.000,00	80
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	166.459.545.651,00	181.966.921.615,00	15.507.375.964,00	109,32
Tunjangan Profesi Guru PNSD	125.750.987.651,00	147.711.104.965,00	21.960.117.314,00	117,46
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	4.098.000.000,00	2.253.900.000,00	-1.844.100.000,00	55
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidid	13.791.000.000,00	13.747.800.000,00	-43.200.000,00	99,69
Bantuan Operasional Kesehatan	13.843.720.000,00	12.258.263.450,00	-1.585.456.550,00	88,61
Jaminan Persalinan	2.522.864.000,00	0	-2.522.864.000,00	0
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.256.370.000,00	797.930.800,00	-458.439.200,00	63,51
Tunjangan Khusus Guru	3.002.902.000,00	2.994.224.400,00	-8.677.600,00	99,71
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.203.698.000,00	2.203.698.000,00	0	100
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	421.772.751.065,00	464.587.158.440,00	42.814.407.375,00	110,15
Pendapatan Hibah	60.331.600.000,00	71.085.723.000,00	10.754.123.000,00	117,83

Tabel 3.3.5

**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah DPPKA selaku PPKA
Tahun 2017**

Uraian	Tahun 2017		Bertambah (berkurang)	
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rupiah	%
PENDAPATAN DAERAH	2.128.779.863.857,00	2.160.990.882.075,06	32.211.018.218,06	101,51
PENDAPATAN ASLI DAERAH	196.786.697.840,00	190.751.415.565,06	(6.035.282.274,94)	96,93
Hasil Pajak Daerah	20.805.328.884,00	24.095.356.184,27	3.290.027.300,27	115,81
Hasil Retribusi Daerah	13.099.105.040,00	12.734.295.205,00	(364.809.835,00)	97,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.563.087.500,00	20.122.055.248,12	2.558.967.748,12	114,57
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	145.319.176.416,00	133.799.708.927,67	(11.519.467.488,33)	92,07
DANA PERIMBANGAN	1.510.220.414.952,00	1.505.652.308.070,00	(4.568.106.882,00)	99,70
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	103.066.007.024,00	95.953.589.690,00	(7.112.417.334,00)	93,10
Dana Alokasi Umum	1.099.838.350.000,00	1.099.838.350.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	307.316.057.928,00	309.860.368.380,00	2.544.310.452,00	100,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	421.772.751.065,00	464.587.158.440,00	42.814.407.375,00	110,15
Pendapatan Hibah	60.331.600.000,00	71.085.723.000,00	10.754.123.000,00	117,83
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	78.486.746.065,00	111.373.876.585,00	32.887.130.520,00	141,90
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	271.773.005.000,00	271.522.438.855,00	(250.566.145,00)	99,91
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.181.400.000,00	10.605.120.000,00	(576.280.000,00)	94,85
BELANJA DAERAH	2.357.563.008.157,00	2.059.742.179.836,36	(297.820.828.320,64)	87,37
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.429.314.169.254,00	1.313.063.698.853,80	(116.250.470.400,20)	91,87
Belanja Pegawai	944.184.228.952,00	836.317.468.920,80	(107.866.760.031,20)	88,58
Belanja Hibah	40.482.524.500,00	39.690.414.600,00	(792.109.900,00)	98,04
Belanja Bantuan Sosial	12.152.630.000,00	9.624.440.000,00	(2.528.190.000,00)	79,20
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.319.564.504,00	0,00	(2.319.564.504,00)	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	428.122.749.298,00	426.053.446.148,00	(2.069.303.150,00)	99,52
Belanja Tidak Terduga	2.052.472.000,00	1.377.929.185,00	(674.542.815,00)	67,14
BELANJA LANGSUNG	928.248.838.903,00	746.678.480.982,56	(181.570.357.920,44)	80,44
Belanja Pegawai	80.483.033.625,00	72.252.892.334,00	(8.230.141.291,00)	89,77
Belanja Barang Dan Jasa	465.695.138.781,00	382.541.613.077,70	(83.153.525.703,30)	82,14
Belanja Modal	382.070.666.497,00	291.883.975.570,86	(90.186.690.926,14)	76,40
SURPLUS / (DEFISIT)	(228.783.144.300,00)	101.248.702.238,70	330.031.846.538,70	(44,26)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	320.764.601.300,00	38.696.206.164,39	(282.068.395.135,61)	12,06
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	289.764.601.300,00	0,00	(289.764.601.300,00)	0,00
Pencairan Dana Cadangan	31.000.000.000,00	38.526.591.151,39	7.526.591.151,39	124,28
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	169.615.013,00	169.615.013,00	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	91.981.457.000,00	25.195.000.000,00	(66.786.457.000,00)	27,39
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	100,00
Penyerlahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	79.481.457.000,00	12.695.000.000,00	(66.786.457.000,00)	15,97
PEMBIAYAAN NETTO	228.783.144.300,00	13.501.206.164,39	(215.281.938.135,61)	5,90
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	114.749.908.403,09	114.749.908.403,09	100,00

Data sementara belum audit BPK

Tabel 3.3.6

**Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada BPPKAD selaku PPKD
Tahun 2016 Tahun 2017**

Uraian	REALISASI		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	
	2016	2017	Rupiah	%
PENDAPATAN DAERAH	2.059.564.134.914,75	2.160.990.882.075,06	101.426.747.160,31	104,92
PENDAPATAN ASLI DAERAH	208.982.186.960,75	190.751.415.565,06	(18.230.771.395,69)	91,28
Hasil Pajak Daerah	17.736.010.382,00	24.095.356.184,27	6.359.345.802,27	135,86
Hasil Retribusi Daerah	25.080.452.414,68	12.734.295.205,00	(12.346.157.209,68)	50,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.151.337.010,24	20.122.055.248,12	4.970.718.237,88	132,81
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	151.014.387.153,83	133.799.708.927,67	(17.214.678.226,16)	88,60
DANA PERIMBANGAN	1.519.918.959.175,00	1.505.652.308.070,00	(14.266.651.105,00)	99,06
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	128.057.691.068,00	95.953.589.690,00	(32.104.101.378,00)	74,93
Dana Alokasi Umum	1.110.487.853.000,00	1.099.838.350.000,00	(10.649.503.000,00)	99,04
Dana Alokasi Khusus	281.373.415.107,00	309.860.368.380,00	28.486.953.273,00	110,12
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	330.662.988.779,00	464.587.158.440,00	133.924.169.661,00	140,50
Pendapatan Hibah	1.277.697.500,00	71.085.723.000,00	69.808.025.500,00	5.563,58
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah	83.029.447.279,00	111.373.876.585,00	28.344.429.306,00	134,14
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	213.894.164.000,00	271.522.438.855,00	57.628.274.855,00	126,94
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah D	32.461.680.000,00	10.605.120.000,00	(21.856.560.000,00)	32,67
BELANJA DAERAH	2.048.692.697.927,37	2.059.742.179.836,36	11.049.481.908,99	100,54
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.345.634.676.874,60	1.313.063.698.853,80	(32.570.978.020,80)	97,58
Belanja Pegawai	921.858.081.258,60	836.317.468.920,80	(85.540.612.337,80)	90,72
Belanja Hibah	40.157.930.800,00	39.690.414.600,00	(467.516.200,00)	98,84
Belanja Bantuan Sosial	15.736.630.000,00	9.624.440.000,00	(6.112.190.000,00)	61,16
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota D	0	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupat	366.505.495.016,00	426.053.446.148,00	59.547.951.132,00	116,25
Belanja Tidak Terduga	1.376.539.800,00	1.377.929.185,00	1.389.385,00	100,10
BELANJA LANGSUNG	703.058.021.052,77	746.678.480.982,56	43.620.459.929,79	106,20
Belanja Pegawai	60.866.254.783,00	72.252.892.334,00	11.386.637.551,00	118,71
Belanja Barang Dan Jasa	370.177.191.111,16	382.541.613.077,70	12.364.421.966,54	103,34
Belanja Modal	272.014.575.158,61	291.883.975.570,86	19.869.400.412,25	107,30
SURPLUS / (DEFISIT)	10.871.436.987,38	101.248.702.238,70	90.377.265.251,32	931,33
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	107.195.000,00	38.696.206.164,39	38.589.011.164,39	36.098,89
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebe	0	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		38.526.591.151,39	38.526.591.151,39	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	107.195.000,00	169.615.013,00	62.420.013,00	158,23
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.500.000.000,00	25.195.000.000,00	12.695.000.000,00	201,56
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	12.695.000.000,00	12.695.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	-12.392.805.000,00	13.501.206.164,39	25.894.011.164,39	(108,94)

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2017 pagu anggaran yang dialokasikan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD sebesar Rp. 2.357.563.008.157,00 2017 terealisasi Rp 2.059.742.179.836,36 atau sekitar 87,37% dengan table sebagai berikut:

Tabel 3.3.7

Anggaran dan Realisasi Belanja DPPKA Tahun 2017

Uraian	Tahun 2017		Bertambah (berkurang)	
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rupiah	%
BELANJA DAERAH	2.357.563.008.157,00	2.059.742.179.836,36	(297.820.828.320,64)	87,37
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.429.314.169.254,00	1.313.063.698.853,80	(116.250.470.400,20)	91,87
Belanja Pegawai	944.184.228.952,00	836.317.468.920,80	(107.866.760.031,20)	88,58
Belanja Hibah	40.482.524.500,00	39.690.414.600,00	(792.109.900,00)	98,04
Belanja Bantuan Sosial	12.152.630.000,00	9.624.440.000,00	(2.528.190.000,00)	79,20
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.319.564.504,00	0,00	(2.319.564.504,00)	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	428.122.749.298,00	426.053.446.148,00	(2.069.303.150,00)	99,52
Belanja Tidak Terduga	2.052.472.000,00	1.377.929.185,00	(674.542.815,00)	67,14
BELANJA LANGSUNG	928.248.838.903,00	746.678.480.982,56	(181.570.357.920,44)	80,44
Belanja Pegawai	80.483.033.625,00	72.252.892.334,00	(8.230.141.291,00)	89,77
Belanja Barang Dan Jasa	465.695.138.781,00	382.541.613.077,70	(83.153.525.703,30)	82,14
Belanja Modal	382.070.666.497,00	291.883.975.570,86	(90.186.690.926,14)	76,40
SURPLUS / (DEFISIT)	(228.783.144.300,00)	101.248.702.238,70	330.031.846.538,70	(44,26)

Data sementara per 31 desember 2017 (sebelum audit BPK)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPPKAD tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala BPPKAD kepada Bupati Sumenep yang telah memberi amanah dan tugas sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian atas ke dua indikator kinerja dari sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) BPPKAD sebagaimana yang diatur dalam pada Peraturan Bupati Sumenep tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, dapat disimpulkan sudah sesuai dengan target bahkan melebihi target katagori Sangat Baik. Rata-rata capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran sebagai berikut:

- Sasaran I Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntebel rata-rata capaian ke-dua indikator kinerja sebesar diatas 100% katagori Sangat Baik. Capaian tersebut memberi gambaran pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Sumenep semakin tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan utama yaitu mewujudkan good governance dan clean government.
- Sasaran II Meningkatkan PAD rata-rata capaian indikator kinerja diatas **96,9** % katagori Sangat Baik. Capaian tersebut menginformasikan tentang peranan pendapatan asli daerah semakin meningkat dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah.

Hasil pengukuran kinerja ke dua indikator kinerja utama BPPKAD tahun 2017 disimpulkan Dua indikator kinerja dengan katagori Sangat Baik.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Drs. Ec. H. DIDIK UNTUNG SAMSIDI, MM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
--

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
NUR AIDI, S.Sos

SUB BAGIAN KEUANGAN
ERIYANTO

Pt. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
LUKMANUL HAKIM, SE

BIDANGPENDATAAN, PENETAPAN DAN PENGENDALIAN
RONI AGUS RIJANTO, SE, M.Si

BIDANG PELAYANAN, PENAGIHAN, DAN PEMBINAAN
Dra. LINDA MARDIANA

BIDANG ANGGARAN
FARDIANSYAH, S.Kom, M.Si

BIDANG PERBENDAHARAAN
RUDI YUYIANTO, SE, M.Si

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PRAM WEDI NUGRAHA, SE, MM

BIDANG ASET
Drs. MOHAMMAD RAMADHAN

Subbid. Pendataan dan Pendaftaran
AMMA SUFIAH, S.Sos

Subbid. Penetapan
NURUDDIN, S.Sos

Subbid. Pengendalian
ANTHONY SYAM, SH

Subbid. Pelayanan Pajak dan retribusi Daerah
BUKHARI, SE, M.Si

Pt. Subbid. Penagihan dan Layanan Keberatan
ACHMAD AFIFI, SE

Subbid. Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Daerahl
AINUR RAFIK, SE, M.Si

Subbid. Pengelolaan Anggaran
R. DODY LESMANA, S.Sos

Subbid. Belanja Langsung
USWATUN HASAH, SE, M.Si

Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
AHMAD MURSIDI, S.Ag, SE, M.Si

Subbid. Pengelolaan Kas Daerah
WAHYU NUGROHO, ST

Subbid. Akuntansi
AHMAD SUSILO, S.Sos, M.Si

Subbid. Evaluasi
M. MUHLIS HARIYANTO, SE

Subbid. Pelaporan
IMAM HIDAYAT, SE

Subbid. Analisa Aset Daerah
SYAIFUL ARIF, ST

Subbid. Akuntansi Aset Daerah
H. HARRY TIAHJONO BH, SE, M.Si

Subbid. Penghapusan Aset Daerah
URIP MARDANI, S.Sos, M.Si

Indikator Kinerja BPPKAD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemda	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatkan PAD	PersentasePendapatan Asli Daerah	15%	15%	15%	15%	15%

Data Sementara belum Ada Opini Hasil Audit BPK